

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Sulawesi Utara secara tahunan pada triwulan IV 2021 berdasarkan kota pencatatannya relatif lebih tinggi dari periode sebelumnya. Inflasi kota Manado tercatat sebesar 2,65% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,06% (yoy). Kenaikan tekanan inflasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga cabai rawit menjelang HBKN Nataru dan kenaikan harga minyak goreng. Fenomena serupa juga terjadi di Kota Kotamobagu. Secara tahunan, inflasi Kota Kotamobagu sebesar 2,51% (yoy) tercatat lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,30% (yoy). Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan komoditas cakalang diawetkan, minyak goreng, dan cabai rawit juga menjadi penggerak utama inflasi di Kota Kotamobagu. Penurunan tekanan inflasi pada Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan menjadi penahan laju inflasi yang lebih dalam di kedua kota.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kenaikan inflasi juga didorong oleh meningkatnya tarif angkutan udara baik pada maskapai full service maupun low cost carrier. Hal ini terjadi akibat tren penurunan kasus aktif Covid-19 pada akhir Triwulan IV 2021 sehingga meningkatkan kegiatan dan mobilitas masyarakat khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Tarif angkutan udara sebelumnya pada tahun 2020 mengalami penurunan harga akibat stimulus pemerintah untuk membebaskan biaya pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) yang berlaku untuk 13 bandara termasuk bandara Sam Ratulangi, sehingga menjadi penyebab deflasi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Mengingat bahwa karakteristik konsumsi komoditas Barito (Bawang, cabai rawit, dan tomat) masyarakat Sulut cukup tinggi, sehingga seringkali pemenuhan kebutuhan pasokan komoditas tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, upaya untuk terus mendorong KAD di Sulawesi Utara masih perlu terus dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan surplus defisit komoditas strategis tersebut. Hingga saat ini, Sulut telah memiliki 1 MoU Kesepakatan Bersama dan 1 Perjanjian Kerja Sama (G-to-G) untuk mendorong implementasi KAD oleh pelaku usaha yaitu: □ MoU - Kesepakatan Bersama 3 Pemerintah Daerah (Sulut, Gorontalo, Maluku) tanggal 23 September 2020 tentang Pengendalian Inflasi Daerah. □ Perjanjian Kerja Sama 6 Pemerintah Daerah (Gorontalo, Sulut, Maluku, Maluku, Papua, Papua Barat) tanggal 14 September 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Hingga saat ini, TPID Sulawesi Utara masih terus mengupayakan realisasi atas kesepakatan Bersama dan PKS yang telah ditandatangani tersebut di atas. Adapun dalam lingkup B-to-B, Kesepakatan Bersama 3 Pemda SulutGoMalut.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID provinsi dan kabupaten/kota juga tetap meningkatkan koordinasi dan komunikasi melalui WhatsApp Group (WAG) untuk pertukaran informasi harga pangan strategis, ataupun informasi rapat-rapat koordinasi pengendalian inflasi. Sementara dalam rangka mengelola ekspektasi masyarakat, Bank Indonesia melaksanakan bauran kebijakan untuk menjaga ekspektasi melalui komunikasi rutin dan terpercaya.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pengendalian inflasi di Sulawesi Utara ke depan masih menghadapi beberapa tantangan. Berdasarkan peta prakiraan curah hujan pada bulan Maret 2022, curah hujan di Kota Manado dan sekitarnya tergolong tinggi dan sangat tinggi (>500 mm). Hal ini akan mempengaruhi jumlah pasokan terutama komoditas hortikultura dan perikanan. Selanjutnya, ketergantungan Sulawesi Utara akan pasokan dari luar daerah terutama untuk komoditas cabai rawit juga masih menjadi tantangan ke depan. Di samping itu, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang telah menetapkan kebijakan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) mulai 1 Januari 2022 dengan kenaikan rata-rata 12% juga akan mempengaruhi kenaikan harga rokok. Di sisi lain, perhatian terhadap pergerakan inflasi menjadi fokus TPID di tengah risiko terjadinya stagnansi harga pada periode pandemi Covid-19. Dengan mencermati perkembangan risiko tersebut, pemanfaatan teknologi melalui belanja online perlu didorong guna menjaga volume permintaan masyarakat terhadap komoditas strategis inflasi. Upaya bersama serta sinergi seluruh dinas dan kementerian/lembaga terkait untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas strategis, memastikan kelancaran distribusi di tengah kemungkinan diberlakukannya pembatasan yang meluas, serta menjaga keterjangkauan harga dan komunikasi efektif perlu senantiasa diperkuat sehingga inflasi dapat terkendali pada rentang sasarannya dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.